

IMPLEMENTASI PROGRAM BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA SEBAGAI UPAYA KETAHANAN PANGAN DI DESA PAGERWOJO KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

Lusi Indri Fauziah¹, Lailul Mursyidah²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, FBHIS, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Indonesia

*Korespondensi: fauziahindri78@gmail.com

Citation (APA):

Fauziah, L. I., & Mursyidah, L. (2025). Implementasi Program Budidaya Tanaman Hortikultura Sebagai Upaya Ketahanan Pangan di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 141–156. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4395>

Email Authors:

fauziahindri78@gmail.com
lailulmursyidah@umsida.ac.id

Submitted: 26 April, 2025

Accepted: 02 Mei, 2025

Published: 25 Mei, 2025

Copyright (c) 2025 Lusi Indri Fauziah, Lailul Mursyidah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, melalui budidaya tanaman hortikultura. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, pelaksanaannya menghadapi sejumlah hambatan, seperti ketiadaan pembukuan hasil panen, belum tersedianya teknologi penyimpanan, serta minimnya pelatihan bagi kelompok masyarakat (Pokmas). Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarlembaga, sikap pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan meskipun terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program, keterlibatan aktif masyarakat, dukungan ekonomi, serta arah kebijakan politik yang kondusif telah berkontribusi pada efektivitas implementasi program. Desa Pagerwojo pun dapat dijadikan contoh praktik baik dalam penerapan program ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Untuk meningkatkan efektivitas program, disarankan agar pemerintah desa serta pihak terkait menyusun sistem pencatatan hasil panen yang terstruktur guna memantau produktivitas secara akurat. Perlunya penyediaan teknologi pascapanen yang memadai, seperti alat penyimpanan atau pengolahan hasil hortikultura. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hal yang krusial melalui pelatihan teknis serta manajerial bagi anggota pokmas. Terakhir, penguatan koordinasi antarinstansi dan pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan program jangka panjang.

Kata kunci: Implementasi; Program_Ketahanan_Pangan; Budidaya_Tanaman_Hortikultura

ABSTRACT

This study examines the implementation of a food security program in Pagerwojo Village, Buduran District, Sidoarjo Regency, through horticultural cultivation. The program aims to promote food independence and improve the welfare of rural communities. However, several challenges hinder its implementation, such as the absence of harvest bookkeeping, lack of post-harvest storage technology, and limited training for community groups (Pokmas). A qualitative descriptive method was used, applying Van Meter and Van Horn's public policy implementation theory, which analyzes six variables: policy standards and objectives, resources, implementer characteristics, inter-organizational communication, implementer disposition, and the economic, social, and political environment. Despite existing obstacles, the findings show that strong community involvement, economic support, and supportive political policies have contributed to the program's effectiveness. Pagerwojo Village serves as a good example of rural food security practices. To further improve the program, it is recommended to establish a structured harvest recording system, provide proper post-harvest technologies, and offer continuous technical and managerial training for Pokmas members. Strengthening coordination among relevant institutions and ensuring ongoing mentoring are also essential to support the program's long-term sustainability.

Keywords: Implementation; Food_Security_Program; Horticultural_Plant_Cultivation

PENDAHULUAN

Lusi Indri Fauziah, Lailul Mursyidah

Ketahanan pangan adalah sektor yang sangat krusial bagi keberlangsungan kehidupan di suatu wilayah, bahkan di tingkat negara. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan menjadi sumber utama bahan pokok bagi masyarakat (Sari et al., 2023). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk penyediaan pangan, yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia dan prasyarat bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Putri et al., 2023). Salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap hari adalah makanan, dan seiring dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan standar hidup, begitu pula dengan kebutuhan akan makanan (Rasman et al., 2023).

Dari publikasi Statistik Ketahanan Pangan, Indonesia mendapat peringkat ke-69 dari 113 negara berdasarkan penilaian skor ketahanan pangan *Global Food Security Index* (GFSI) (Fadila. M.A & Putri, 2023). GFSI sendiri dirumuskan oleh *Economist Intelligence Unit* (EIU) yang keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan dan kemampuan beradaptasi adalah empat indikator untuk GFSI untuk mengukur ketahanan pangan suatu negara. Menurut peringkat ketahanan pangan GFSI yang terus berkembang, Indonesia terus tertinggal dari beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dikhawatirkan bahwa penyakit ini akan membuat masyarakat lebih rentan terhadap keadaan darurat pangan (Yulianti et al., 2023).

UU No. 18/2012 terkait Pangan, yang menggantikan UU No. 7/1996, memberikan penekanan kuat pada pengembangan ketahanan pangan di Indonesia dan didasarkan pada kedaulatan dan kemandirian pangan (Apriyanto et al., 2023). Menurut UU No. 18/2012 tentang ketahanan pangan, indikator ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang cukup dari segi jumlah dan mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga dapat hidup secara mandiri, sehat, dan produktif (Dedy Sutrisno, 2022). Selain itu, produksi lokal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.

Kabupaten Sidoarjo mempunyai 18 kecamatan dan hampir seluruh kecamatan mempunyai peranan masing-masing dalam program pengelolaan ketahanan pangan nabati dan non nabati. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong seluruh desa untuk melakukan inovasi di bidang ketahanan pangan (Ariyanti et al., 2023). Pernyataan ini semakin dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal sebesar 20%. Hal ini diharapkan dapat membantu desa mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan sedini mungkin serta Permendesa PDPTT No 13/2023 terkait "Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024" yang salah satunya difokuskan untuk mendukung program ketahanan hewani dan pangan (Sufiyanto et al., 2021).

Kemampuan masyarakat desa dalam mengelola pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, air dan sumber daya perairan untuk menyediakan pangan yang cukup menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di desa (Rumawas et al., 2021). Kebijakan ketahanan pangan desa mengacu pada upaya mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, terutama melalui penyelenggaraan desa yang bebas kemiskinan dan kelaparan, desa sehat dan sejahtera serta terpenuhinya kebutuhan pokok (Arifin & Sukmana, 2022). Menurut UU No 6/2014 terkait Desa, Melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pendayagunaan potensi desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 82/2022 tentang Rekomendasi Ketahanan Pangan Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan rekomendasi ketahanan pangan. Hal tersebut menjadi dasar untuk memastikan seluruh desa di Indonesia terlepas dari kerawanan pangan, menciptakan kecukupan pangan bagi seluruh masyarakat desa dan pencapaian desa yang mandiri di bidang pangan.

Salah satu komunitas di Kabupaten Sidoarjo yang menjalankan inisiatif ketahanan pangan adalah Desa Pagerwojo. Budidaya tanaman dan peternakan adalah dua pilar utama yang menjadi dasar program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo. Empat dusun di Desa Pagerwojo, yaitu Kauman, Prapatan, Kalak, dan Ngemplak, merupakan tempat program peternakan dilaksanakan. Dukuh adalah satu-satunya dusun di mana program penanaman tanaman saat ini dilakukan. Fokus program ketahanan pangan Desa Pagerwojo yaitu terletak pada bidang nabati yang bertujuan untuk mendukung keberagaman sumber pangan dan kemandirian pangan Desa Pagerwojo.

Program ketahanan pangan di bidang nabati dilaksanakan melalui suatu kegiatan pengembangan ketahanan dan kemandirian pangan Desa Pagerwojo berupa usaha tani yang berbasis berkelanjutan serta berkesinambungan. Adapun bentuk usaha tani tersebut adalah sektor pangan, hortikultura, hingga pengelolaan pasca panen. Program ketahanan pangan pemerintah Desa Pagerwojo bertujuan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, kegiatan ini diwujudkan melalui optimalisasi anggaran yang ada di desa yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dalam implementasinya mengedepankan acuan regulasi perundang-undangan dan prinsip partisipasi masyarakat desa dengan melalui tahapan musyawarah desa. Kegiatan ini memanfaatkan lahan TKD Desa Pagerwojo seluas kurang lebih 1 hektar dan berjalan sejak tahun 2022. Melalui program ketahanan pangan, pemerintah Desa Pagerwojo berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Salah satu cara yang diambil adalah dengan memanfaatkan lahan perkebunan sebagai sumber pangan alternatif bagi masyarakat Desa Pagerwojo. Pemerintah Desa Pagerwojo memanfaatkan tanah kas desa (TKD) untuk menanam tanaman hortikultura seperti pisang, pepaya, cabe, mangga, alpukat, terong serta inovasi dari kelompok masyarakat dan pemerintah desa melalui Green House yaitu melon. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan Desa Pagerwojo dijalankan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terbentuk dan dipilih melalui musyawarah desa. Anggota Pokmas yang memiliki keterlibatan dalam program ketahanan pangan merupakan masyarakat asli Desa Pagerwojo yang tinggal di sekitar lokasi program. Struktur kepengurusan dalam pengelolaan program ini terdiri dari tiga pengurus inti yang berisi ketua, sekretaris, bendahara dan tiga orang anggota.

Dalam program ketahanan pangan Desa Pagerwojo rekapitulasi hasil panen menggambarkan perbandingan jumlah panen dari lima jenis komoditas pertanian selama dua tahun, yaitu 2023 dan 2024. Komoditas pertanian tersebut meliputi pisang, melon, pepaya, cabai dan terong. Berdasarkan data yang diperoleh, hasil panen pisang tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 8 buah setiap tahunnya. Namun, panen melon menurun dari 150 buah pada tahun 2023 menjadi 100 buah pada tahun 2024, yang

menunjukkan adanya penurunan produksi sebanyak 50 buah. Hal serupa juga terjadi pada pepaya yang mengalami penurunan sebesar 50 kg, dari 150 kg menjadi 100 kg. Untuk komoditas cabe, hasil panennya stabil di angka 50 kg pada kedua tahun tersebut. Sementara itu, panen terong mengalami penurunan yang cukup besar, dari 100 kg di tahun 2023 menjadi hanya 50 kg pada tahun 2024.

Hasil panen tersebut disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian dibagikan kepada pos-pos posyandu untuk pemenuhan nutrisi bagi anak-anak yang kekurangan gizi, juga dibagikan kepada ibu-ibu PKK, dan lansia, sebagian juga dijual kepada masyarakat Desa Pagerwojo dengan harga di bawah pasar dikarenakan program ini masih baru berjalan sehingga hasil panen masih belum maksimal karena kualitasnya masih belum bagus. Penurunan produktivitas pada beberapa jenis tanaman seperti melon, pepaya dan terong dikarenakan belum adanya pembukuan atau pencatatan yang baik terkait hasil dan proses pertanian sehingga menyulitkan dalam merancang perencanaan masa tanam berikutnya secara efektif. Selain itu, belum tersedianya teknologi penyimpanan hasil panen juga menjadi penyebab utama cepatnya pembusukan, terutama pada komoditas yang tidak segera dijual atau dikonsumsi. Serta kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi anggota Pokmas dalam mengelola program ketahanan pangan juga berkontribusi pada kurang optimalnya hasil yang diperoleh.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Wilayah Pedesaan (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo)” penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan sebagai berikut: penggunaan teknologi menjadi salah satu alat komunikasi sebagai pengaktualan dari kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung dan memadai untuk merealisasikan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dapat dikatakan bahwa karakter atau sikap para peserta kebijakan ketahanan pangan bertanggung jawab dan konsisten dengan aturan yang berlaku.

Temuan (Setiawan et al., 2023) dengan judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan” dengan metode penelitian kualitatif dilakukan di Kantor Penyuluh Pertanian Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Temuan menunjukkan pelaksanaan program ketahanan pangan tanaman padi di Kecamatan Benai masih belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tidak semua petani padi mengalami komunikasi antara pelaksana dan pembuat kebijakan. Selain itu, sumber daya yang ada-baik sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas belum dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, proses penerapan kebijakan berjalan lambat, serta sikap dan disposisi para pelaksana yang tidak ideal. Terakhir, kerangka kerja pemerintah memerlukan sejumlah langkah sebelum petani dapat menerapkan kebijakan.

Terakhir, temuan (Natalia Vera, 2021) dengan judul “Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur” metodologi kualitatif pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan temuan, Program Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur berada di bawah standar karena alasan pertama: badan tersebut tidak efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kedua, masih ada masalah dengan Program Lumbung Pangan, seperti fakta bahwa lumbung pangan tidak beroperasi sesering yang seharusnya karena kekurangan dana. Ketiga, program toko tani sebagai pasar penyeimbang belum berjalan baik karena

peneliti menemukan toko tani tidak ada lokasi jelas dan masih memakai rumah pribadi PPL. Hal ini diperparah dengan sikap masyarakat yang tidak mau tahu dengan keberadaan toko tani.

Penelitian ini menitikberatkan pada praktik budidaya hortikultura di tingkat desa dengan pendekatan partisipasi berbasis musyawarah desa, serta menggarisbawahi kekuatan gotong royong masyarakat sebagai faktor pendukung utama. Selain itu, penelitian ini menyoroti hambatan spesifik seperti absennya pembukuan hasil panen dan keterbatasan teknologi pascapanen. Namun, juga menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, program tetap berjalan efektif berkat sinergi antara pemerintah desa, Pokmas, dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan kontekstual lokal dan fokus pada kolaborasi menjadi keunikan dan keunggulan pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Studi ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Lailatul Nur Firdaus et al., 2023) untuk menganalisis pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Menurut model ini, sejumlah indikator yang saling berhubungan, seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi, semuanya berdampak pada bagaimana kebijakan diimplementasikan (Pramono, 2020).

Dari observasi di lapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi program budidaya tanaman hortikultura sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, antara lain belum adanya pembukuan untuk hasil panen sehingga sulit untuk mengukur produktivitas, belum adanya teknologi atau fasilitas penunjang dalam menyimpan hasil panen akibatnya hasil panen cepat mengalami pembusukan yang berpengaruh pada stabilitas pasokan pangan, kurangnya pelatihan yang memadai untuk anggota Pokmas dalam mengelola tanaman hortikultura sehingga program ketahanan pangan tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Sehingga, Desa Pagerwojo yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dipilih sebagai lokasi penelitian terkait implementasi program tersebut. Dalam konteks ini, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Program Budidaya Tanaman Hortikultura Sebagai Upaya Ketahanan Pangan di Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo". Tujuan studi menganalisis dan mendeskripsikan berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi program budidaya tanaman hortikultura sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

METODE

Untuk meneliti keadaan secara alami, digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif yang di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fakta-fakta mengenai pelaksanaan program ketahanan pangan dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Dusun Dukuh, RT 23 RW 06, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan bagian dari wilayah ketahanan pangan Desa Pagerwojo. Pelaksanaan inisiatif ketahanan pangan di Desa Pagerwojo merupakan subjek utama dari penelitian ini. Sumber data primer dan sekunder digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian berjalan dengan baik, para peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data menurut Sugiono (2018)

dalam (Ita Suryani, Horidatul Bakiyah, 2020) yang ini meliputi: (a) Observasi, yang melibatkan pengamatan dan pendokumentasian keadaan atau perilaku objek sasaran. (b) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. (c) Dokumentasi, yang membuat data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi lapangan menjadi lebih akurat dan kaya. Dokumentasi ini juga dapat dikonsultasikan untuk mengkonfirmasi keakuratan data.

Menurut Sugiyono (2019) dalam (Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, 2019), purposive sampling adalah sebuah strategi untuk memilih sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, digunakan untuk mengidentifikasi informan. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yaitu Bapak Moh Djainudin dan Bapak Moh Nadlor, lembaga sosial yaitu posyandu dan ibu-ibu PKK, Pemerintah Desa Pagerwojo, Dinas Pertanian, dan Masyarakat Desa Pagerwojo. Dalam penelitian ini, teknik penganalisisan data yang digunakan mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam (Suriani et al., 2023), yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: (a) Pengumpulan data, yaitu proses pengumpulan informasi yang tidak terbatas pada data akhir yang akan dianalisis segera untuk menarik kesimpulan. (b) Reduksi data, di mana tahap ini bertujuan untuk mengarahkan, mengelompokkan, menajamkan, serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya dengan lebih baik. (c) Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan serta mengambil tindakan yang tepat. (d) Tahap terakhir dalam metode analisis data, penarikan kesimpulan, memungkinkan para peneliti untuk mencapai penilaian yang didukung oleh bukti-bukti yang dikumpulkan dengan tepat dan meyakinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam suatu program karena menentukan efektivitas pencapaian tujuan yang telah dirancang (Hartati et al., 2024). Terdapat tantangan dan keterbatasan di lapangan dalam program ketahanan pangan Desa Pagerwojo. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn, mencakup 6 indikator, yakni 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) karakteristik agen pelaksana, 4) sikap atau disposisi para pelaksana, 5) komunikasi antarorganisasi, dan 6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi program. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai 6 indikator sebagai dimensi dalam penelitian mengenai implementasi program budidaya tanaman hortikultura sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Firdaus, 2023), menyatakan bahwa agar standar dan sasaran kebijakan dapat dipenuhi, maka standar dan sasaran tersebut harus tepat dan dapat diukur. Interpretasi yang beragam terhadap standar dan sasaran dapat dengan mudah menimbulkan konflik di antara para agen pelaksana (Firdaus, 2023). Karena pencapaian tujuan kebijakan sangat penting bagi keberhasilan program, maka tujuan tersebut merupakan faktor penting dalam implementasi program. Apakah tujuan program sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, tujuan program ketahanan pangan desa adalah untuk mengentaskan dan mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, menurut data sekunder dari Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021. Pemerintah mengambil langkah-

langkah ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi (Yuliansyah et al., 2025). Masyarakat menyadari tujuan dari program ketahanan pangan desa, yang dibiayai oleh keuangan daerah, berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan dari wawancara dengan sejumlah responden penting, termasuk pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Karena sosialisasi dilakukan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah untuk menjamin bahwa tujuan program dipahami oleh mereka yang melaksanakannya di tingkat lokal, maka mereka pun mengetahuinya.

Indikator ini dapat dilihat dari seberapa baik tujuan program ketahanan pangan tercapai. Sebagaimana uraian KepmenDesa No 82/2022 terkait “Pedoman Ketahanan Pangan di Desa”, pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, termasuk dalam kategori yang berbeda dan terukur. Sasaran kebijakan pada program ketahanan pangan Desa Pagerwojo mengarah kepada masyarakat rentan atau keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, lansia, dan anak-anak yang kekurangan gizi untuk memastikan mereka mendapatkan akses pangan yang cukup. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang berasal dari hasil produksi masyarakat desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pagerwojo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Djainuddin selaku Pokmas bidang budidaya tanaman pangan yang menyatakan bahwa:

“sasaran utama program ketahanan pangan Desa Pagerwojo adalah masyarakat yang tergolong rentan pangan, seperti keluarga miskin, lansia, ibu hamil, dan anak-anak yang kekurangan gizi. Namun, kami juga mendistribusikan hasil ketahanan pangan untuk mendukung kegiatan sosial di desa, seperti posyandu dan ibu-ibu PKK” (Hasil wawancara, 20 Februari 2025).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menafsirkan standar dan sasaran kebijakan di Desa Pagerwojo dalam mengimplementasikan kebijakan program ketahanan pangan sudah bisa dikatakan berhasil di mana pemerintah desa sudah menerapkan program ketahanan pangan sesuai tujuan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang berasal dari hasil produksi masyarakat desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pagerwojo.

Sumber Daya. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila sumber dayanya belum terpenuhi secara maksimal. Dalam implementasi program ketahanan pangan terdapat beberapa sumber daya, antara lain sumber daya manusia seperti Kepala Desa Pagerwojo dan Kelompok Masyarakat (Pokmas), serta sumber daya finansial seperti dana desa. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pedoman yang ditentukan (Fazry, 2019). Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan dalam proses implementasi program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Djainuddin yang menjabat sebagai Pokmas bidang budidaya tanaman pangan yang menyatakan bahwa:

“sebagian besar anggota Pokmas belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait pengelolaan pangan dan pemahaman mengenai pentingnya prosedur yang tepat mulai dari pendataan hingga distribusi. Selain itu, motivasi para anggota Pokmas juga sering menurun

karena kurangnya insentif sehingga beberapa petugas lebih memilih bekerja dibandingkan mengurus ketahanan pangan karena banyaknya tuntutan kebutuhan sehingga hanya beberapa anggota saja yang masih aktif, akibatnya pembagian tugas kadang tidak merata, sehingga beberapa orang merasa terbebani. Kami juga memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja yang dapat fokus mengelola pembukuan hasil panen akibatnya program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo tidak mempunyai data untuk hasil panen, rencananya akan kami buat papan pintar” (Hasil wawancara, 20 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djainuddin selaku Pokmas bidang budidaya tanaman pangan, kendala dalam indikator sumber daya manusia terletak pada kurangnya jumlah pegawai disebabkan karena banyak anggota Pokmas yang memilih bekerja dikarenakan tuntutan kebutuhan, serta kompetensi maupun kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan masih belum memadai akibatnya dalam mengelola tanaman hortikultura belum sepenuhnya maksimal sehingga berdampak pada menurunnya hasil panen. Kendala lain juga terletak pada keterbatasan tenaga kerja yang bisa fokus dalam hal pembukuan hasil panen, tanpa adanya sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pembukuan dengan tepat, sulit untuk merencanakan dan mengevaluasi hasil panen secara efektif yang akibatnya bisa memengaruhi perencanaan masa tanam yang akan datang.

Sumber dukungan lain yang menentukan keberhasilan dalam menerapkan program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo adalah ketersediaan infrastruktur dan dana. Infrastruktur memainkan peran yang krusial dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, karena menjadi fondasi utama yang mendukung keberhasilan setiap aspek program tersebut (Simatupang et al., 2023). Dalam konteks ketahanan pangan, sarana prasarana seperti gedung penyimpanan, saluran irigasi, akses jalan, lahan parkir serta alat dan teknologi pertanian berfungsi untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan kualitas pangan yang optimal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Djainuddin selaku Pokmas bidang budidaya tanaman pangan yang menyatakan bahwa:

“Kendala terletak pada fasilitas gedung penyimpanan dikarenakan sifatnya masih sebatas pengamanan dari terik matahari dan hujan, kami belum memiliki teknologi seperti pendingin atau sistem kontrol kelembapan. Akibatnya, hasil panen sering kali cepat rusak, terutama pada buah atau sayuran yang lunak. Akan tetapi, untuk sarana dan prasarana yang lain sudah cukup baik” (Hasil wawancara, 20 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan sarana dan prasarana seperti saluran irigasi, akses jalan serta lahan parkir sudah menunjukkan kondisi yang memadai yang menunjang hasil panen menjadi lebih maksimal. Kendala terletak pada fasilitas gudang penyimpanan yang sifatnya masih sederhana dan tidak ada teknologi penunjang untuk menyimpan hasil panen. Akibatnya, hasil panen menjadi cepat busuk khususnya pada buah atau sayuran yang lunak. Hal tersebut berpengaruh pada kualitas pangan, akibatnya hasil panen sering kali dijual di bawah harga pasar karena kualitasnya yang masih belum bagus. Selain pada kualitas pangan, juga berpengaruh pada stabilitas pasokan pangan yang menyebabkan hasil panen cepat mengalami pembusukan.

Untuk sumber dana program ketahanan pangan Desa Pagerwojo berasal dari alokasi dana desa. Dana ini dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai aspek ketahanan pangan. Dana desa

telah dikelola dengan baik dan efektif untuk mendukung berbagai aspek program ketahanan pangan. Dana desa telah dialokasikan sesuai prioritas yang disepakati melalui musyawarah desa, seperti pembelian pupuk dan bibit tanaman, pembangunan saluran irigasi, perbaikan akses jalan, pembangunan gudang penyimpanan hasil panen, dan lain-lain. Penggunaan dana tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peningkatan produktivitas pertanian tetapi juga memperkuat infrastruktur yang mendukung distribusi dan penyimpanan hasil panen. Dengan transparansi pengelolaan dan pengawasan yang ketat, masyarakat Desa Pagerwojo merasakan dampak positif dari implementasi program ketahanan pangan ini, baik dalam bentuk peningkatan hasil panen maupun stabilitas ekonomi petani.

Temuan ini diperkuat oleh studi sebelumnya yang meneliti mengenai “Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi” (Setiawan et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program ketahanan pangan di Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, terhambat oleh indikator-indikator yang berkaitan dengan sumber daya-baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung-yang belum terpenuhi secara memadai. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyoroti pentingnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya termasuk infrastruktur pendukung selain sumber daya keuangan dan manusia. Berdasarkan hasil wawancara, dana dari masyarakat telah dialokasikan secara tepat dan digunakan untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan. Namun, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, kompeten, dan terampil serta fasilitas pendukung (peralatan dan infrastruktur) yang sesuai sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Tanpa kedua kriteria tersebut, program ini berpotensi gagal mencapai tujuannya.

Karakteristik Agen Pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, ada berbagai aspek yang mungkin mempengaruhi organisasi dalam menjalankan sebuah kebijakan, di antaranya adalah jumlah pengawasan hierarkis atas pilihan yang dibuat dan pelaksana kebijakan yang disiplin, akuntabel, dan keras. Dalam hal tingkat hierarki pengambilan keputusan, organisasi pelaksana di Desa Pagerwojo melakukan musyawarah desa untuk mendapatkan konsensus bersama yang kemudian akan mereka jalankan. Agen pelaksana ini terdiri dari perangkat desa, Pokmas, dan mitra lain seperti penyuluh pertanian dan masyarakat setempat yang terlibat aktif dalam berbagai tahapan program. Perangkat desa memiliki peran utama sebagai koordinator dalam pelaksanaan program. Mereka bertanggung jawab menyusun perencanaan berbasis kebutuhan lokal melalui musyawarah desa, mengalokasikan dana desa sesuai prioritas yang disepakati, serta memantau implementasi program agar berjalan sesuai dengan rencana. Karakteristik utama perangkat desa yang mendukung efektivitas kebijakan adalah kemampuan mereka dalam mengkoordinasikan berbagai pihak, menjalin komunikasi yang terbuka, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat secara aktif, sehingga seluruh unsur merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Dilago et al., 2019).

Pokmas merupakan aktor utama dalam implementasi teknis program yang bertugas memanfaatkan sarana yang telah disediakan, seperti irigasi atau alat pertanian, untuk meningkatkan produktivitas lahan. Karakteristik pokmas yang ideal meliputi kerja sama yang solid antar anggota, semangat inovasi, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan program. Penyuluh pertanian, dari Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo, menjadi pendukung utama dengan memberikan konsultasi dan pendampingan kepada para

anggota Pokmas. Mereka memiliki pengetahuan teknis tentang metode pertanian moderen dan berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan anggota Pokmas dalam menyampaikan informasi atau kebijakan terbaru. Karakteristik penyuluh yang efektif adalah kemampuan mereka dalam menjelaskan konsep secara sederhana, fleksibilitas dalam memahami tantangan lokal, dan kemampuan membangun kepercayaan dengan komunitas desa. Selain Bapak Djainuddin, wawancara juga dilakukan bersama Bapak Nadlor selaku anggota Pokmas yang menyatakan bahwa:

“Agen pelaksana dalam program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo memang terdiri dari berbagai pihak yang saling bekerja sama. Kami memiliki perangkat desa, anggota Pokmas, penyuluh pertanian, dan masyarakat sekitar yang semuanya saling mendukung. kami juga memfasilitasi musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan aspirasi mereka” (Hasil wawancara, 20 Februari 2025).

Kerja sama antara anggota Pokmas, penyuluh pertanian dari kecamatan, Dinas Pertanian serta masyarakat Desa Pagerwojo memegang peranan penting untuk keberhasilan program. Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana dalam program ketahanan pangan Desa Pagerwojo sudah cukup baik. Keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara semua agen pelaksana serta koordinasi yang baik dari semua pihak. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, struktur organisasi yang baik memiliki pengaruh besar terhadap kinerja agen pelaksana dalam implementasi kebijakan, sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Adanya pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan sistem administrasi yang terorganisir memungkinkan agen pelaksana untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Selain itu, struktur yang baik juga mendukung peningkatan komitmen, pengetahuan teknis, dan kemampuan beradaptasi agen pelaksana, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan (Anwar et al., 2025).

Sikap atau Disposisi Para Pelaksana. Disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan program tersebut. Setiap agen pelaksana mulai dari perangkat desa, anggota kelompok masyarakat (Pokmas), penyuluh pertanian, hingga masyarakat umum memiliki sikap yang beragam namun saling mendukung demi kelancaran pelaksanaan program. Perangkat desa menunjukkan sikap proaktif, terbuka, dan kolaboratif. Sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, mereka berkomitmen untuk melaksanakan program ketahanan pangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mereka juga secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan bahwa pelaksanaan program tetap sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Anggota Pokmas menunjukkan sikap terbuka untuk belajar, yang tercermin dari cara mereka mengelola lahan pertanian secara mandiri dan kolektif. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Bapak Nadlor dalam wawancara pada 20 februari 2025:

“Dalam mengurus program ketahanan pangan, semua anggota otodidak, kadang juga belajar bersama-sama. Terutama bagi kami, anggota Pokmas, kami menekankan pentingnya kemauan belajar karena kami menyadari bahwa dunia pertanian terus mengalami

perkembangan. Kami ingin memastikan bahwa para pelaksana program ini siap belajar dan beradaptasi. Contohnya, kami sering mengadakan pertemuan untuk saling tanya dan mempelajari teknik baru dalam penanaman dan pengendalian hama.”

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya disposisi positif dari agen pelaksana untuk belajar secara mandiri dan bersama-sama. Meskipun belum sepenuhnya memahami keseluruhan program, mereka memiliki kesadaran bahwa ketahanan pangan tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Para pelaksana memahami bahwa kemandirian pangan merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan luar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi terdahulu mengenai “Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Wilayah Pedesaan (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo)” oleh (Fatimah et al., 2024). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kemauan sendiri dan kesiapan untuk belajar turut mendukung keberhasilan program budidaya ikan tanpa hambatan yang berarti.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi agen pelaksana merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Inisiatif anggota Pokmas untuk belajar secara otodidak menunjukkan adanya komitmen dan keinginan untuk berkembang, yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas kebijakan. Sikap terbuka untuk belajar dan adaptif terhadap perubahan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program budidaya tanaman hortikultura sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Pagerwojo.

Komunikasi Antar Organisasi. Komunikasi adalah bagian dari implementasi dalam rangka memberikan informasi kebijakan program supaya dapat tersampaikan kepada para sasaran (Sukandar et al., 2017). Variabel komunikasi diperlukan dalam situasi ini. Koordinasi yang efektif adalah hasil komunikasi yang efektif antara individu dan organisasi. Rencana tersebut harus dinyatakan dengan jelas sebagai bagian dari proses implementasi. Untuk menjamin kesejahteraan pangan di Desa Pagerwojo, diperlukan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan Pokmas. Komunikasi merupakan suatu prosedur untuk pertukaran informasi yang berfungsi sebagai sumber daya untuk pemeliharaan, kemajuan, dan pengembangan organisasi yang fleksibel sesuai dengan tujuannya. Komunikasi yang terjadi di Desa Pagerwojo dalam implementasi program ketahanan pangan berjalan cukup baik, sebagaimana yang disampaikan Bapak Nadlor dalam wawancaranya yang menyatakan bahwa:

“komunikasi antara perangkat desa dan anggota Pokmas yang berada di lapangan sangat terstruktur dan dilakukan secara rutin. Dalam pertemuan ini, perangkat desa mendengarkan laporan mengenai kebutuhan mereka di lapangan, seperti bantuan sarana pertanian, kesulitan yang dihadapi. Kami juga memastikan ada komunikasi dua arah, sehingga kami anggota Pokmas dapat memberikan masukan atau kritik terhadap pelaksanaan program. Komunikasi kami anggota Pokmas dengan Dinas Pertanian cukup baik. Begitu ada kendala di lapangan kemudian kami hubungi melalui WA mereka langsung datang ke lokasi jadi kami memiliki mekanisme koordinasi yang jelas” (Wawancara tanggal 20 Februari 2025).

Dari wawancara di atas bisa dipastikan bahwa komunikasi yang baik memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan program dan langkah-langkah yang harus diambil. Hal tersebut juga membantu mengurangi risiko kesalahpahaman atau duplikasi pekerjaan. Dengan adanya komunikasi yang terstruktur, kendala yang ada di lapangan bisa cepat teratasi dan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Adanya komunikasi yang baik adalah salah satu pilar utama keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam indikator komunikasi antar organisasi menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara aktor-aktor dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika komunikasi antar organisasi berjalan lancar, maka koordinasi yang baik dapat terjadi, yang berujung pada implementasi kebijakan yang lebih sukses.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Prasyarat ini mencakup ketersediaan lingkungan yang dapat memfasilitasi implementasi kebijakan secara efektif, mengingat sejauh mana lingkungan kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Variabel ini juga memiliki peranan penting dalam menilai kinerja pemerintah. Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan eksternal berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan publik (Astutiningsih, 2024). Kondisi lingkungan eksternal yang kurang mendukung atau tidak kondusif dapat menghambat atau bahkan menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Desa Pagerwojo memiliki masyarakat yang hidup dalam suasana gotong royong yang kuat, sebuah karakteristik khas desa yang sangat mendukung program ketahanan pangan. Hubungan sosial di antara warga sangat erat, dan ini tercermin dalam kerja sama mereka dalam mengelola lahan pertanian, berbagi informasi, hingga berbagi sumber daya seperti alat pertanian.

Secara ekonomi, Desa Pagerwojo di dominasi oleh sektor pertanian, di mana sekitar 60% penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Ketahanan pangan sangat relevan dalam konteks ini karena kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian. Pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat melalui alokasi anggaran desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Misalnya, mereka menyediakan bantuan subsidi untuk benih dan pupuk, memperbaiki infrastruktur irigasi, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam konteks politik, implementasi program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo didukung oleh kebijakan pemerintah desa yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Komitmen pemerintah desa untuk menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas muncul karena kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan demi meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial warga. Kebijakan ini berdampak pada alokasi dana desa yang signifikan dan terarah untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan program. Masyarakat desa, khususnya petani dan kelompok masyarakat yang mengelola budidaya hortikultura, mendapatkan manfaat berupa bantuan, pelatihan, dan sarana produksi yang memadai. Di sisi lain, pemerintah desa memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari warga atas kepemimpinannya. Melalui musyawarah desa sebagai forum utama, terjadi pertukaran informasi, aspirasi, dan kebutuhan antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat menyampaikan harapan dan

kebutuhan terkait ketahanan pangan, sementara pemerintah desa menyesuaikan rencana dan alokasi dana berdasarkan masukan tersebut. Pertukaran ini menciptakan sinergi yang memastikan program berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Ketiga aspek ini berjalan dengan baik dan memberikan dasar yang kuat bagi keberhasilan program ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, meskipun tetap memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Kombinasi dari keterlibatan masyarakat, dukungan ekonomi, dan kebijakan politik yang tepat telah menjadikan Desa Pagerwojo contoh bagaimana program ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pedesaan. Jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975) indikator ketiga aspek lingkungan ini berjalan dengan baik, maka tujuan program ketahanan pangan akan lebih mudah dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan ini akan memudahkan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya didukung oleh pemerintah, tetapi juga diterima oleh masyarakat (Harnanda, 2020).

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi program budidaya tanaman hortikultura sebagai upaya ketahanan pangan di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang bertujuan meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui budidaya tanaman hortikultura dan pengelolaan pasca panen. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ditemukan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh enam variabel utama: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Program ini efektif dalam meningkatkan ketersediaan pangan lokal serta kesejahteraan masyarakat meskipun masih menghadapi kendala.

Faktor pendukung keberhasilan program meliputi dukungan kuat dari pemerintah desa melalui kebijakan dan alokasi anggaran, keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program, serta kondisi sosial yang kondusif seperti tradisi gotong royong yang memperkuat kerja sama. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pencatatan hasil panen secara sistematis, minimnya teknologi penyimpanan sehingga menyebabkan kerusakan hasil panen, serta keterbatasan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota Pokmas.

Rekomendasi yang diajukan antara lain, pengembangan sistem pencatatan hasil panen yang terstruktur untuk memudahkan pemantauan, evaluasi produktivitas, penyediaan teknologi penyimpanan dan pengolahan hasil panen yang memadai untuk mengurangi kerusakan, peningkatan pelatihan teknis dan manajerial bagi anggota Pokmas guna meningkatkan kemampuan pengelolaan program, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antar pelaksana program serta stakeholder terkait untuk mendukung keberlanjutan program. Limitasi penelitian ini terletak pada penggunaan metode kualitatif deskriptif yang berfokus pada satu desa sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R., Hadiyoso, S., & Putri, H. (2025). *Pemberdayaan PKK melalui Implementasi Pertanian*

Hidroponik di RW . 08 Desa Cipagalo , Kabupaten Bandung Guna Mendukung. 4(01), 27–36.

Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361–368. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.510>

Arifin, M. Z., & Sukmana, H. (2022). *Implementation of the food Security Program is the Sumorame Village government , candi sub-district , Sidoarjo district [Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Pemerintahan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]*. 1–13.

Ariyanti, D., Sukmana, H., Studi, P., & Publik, A. (2023). *Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) [Implementation Of Food Security (Case Study Of Tropodo Village, Krian District, Sidoarjo Regency)]*. 1–11.

Astutiningsih, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Pemasaran Dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Komparatif Pada Desa Wisata Candirejo Dan Karangrejo Kabupaten Magelang)*. 6(1), 1–30.

Dedy Sutrisno, A. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(Vol. 13 No. 1), 28–42. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.4862>

Dilago, W. R., Lalomah, A., & Plangiten, N. N. (2019). Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Suatu Studi Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(76), 69–78.

Fadila, M.A, & Putri, N. . (2023). Analysis of Food Security Development in Indonesia : A Big Data and Data Mining Approach. *Seminar Nasional Official Statistics , 2022*, 1–10.

Fatimah, H. N., Septian, A., Pradana, Y., Erisesa, M. P., Tania, M. A., & Zakiya, R. Z. (2024). *PEDESAAN (Studi pada Praktik Budidaya Ikan di Desa Medaeng, Sidoarjo) IMPLEMENTATION OF FOOD SECURITY POLICIES IN THE REGION RURAL (Study on Fish Cultivation Practices in Medaeng Village, Sidoarjo)*. 2(2), 2024–2052.

Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358–375.

Firdaus, L. N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI BERKAS MLAKU DEWE (BMW) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(06), 1–13.

Harnanda, W. (2020). *Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)*.

Hartati, S., Yahya, M. R., & Sutrisno, S. (2024). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dalam Bidang Pertanian Di Desa Mayang Sari. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 7(1), 107–119. <https://doi.org/10.36341/jdp.v7i1.4193>

Ita Suryani, Horidatul Bakiyah, M. I. (2020). *Strategi public relations Pt honda megatama kapuk dalam costumer relations*. 9, 1–9.

Lailatul Nur Firdaus, Arief Darmawan, & Yusuf Hariyoko. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN*

PELAYANAN ADMINISTRASI BERBASIS APLIKASI BERKAS MLAKU DEWE (BMW) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO. 3(06), 1–13.

- Natalia Vera. (2021). Implementasi Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 23–31. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i1.1129>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Putri, S. D. R., Yuningsih, N. Y., & Darmawan, I. (2023). Implementasi Program Buruan Sae (Sehat, Alami, Ekonomis) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kota Bandung Pada Tahun 2020-2021. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 3(1), 15.
- Rasman, A., Theresia, E. S., & Aginda, M. F. (2023). Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. *Holistic: Journal of Tropical Agriculture Sciences*, 1(1), 36–68. <https://doi.org/10.61511/hjtas.v1i1.2023.183>
- Rumawas, V. V., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Governance*, 1(1), 1–12.
- Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, Y. U. (2019). Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 671–680.
- Sari, Y., Devianty, R., Lusianti, E. F., Amanda, D. R., Aprilia, S. P., & Utami, W. (2023). Peran Masyarakat dalam Kegiatan Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Memanfaatkan Pekarangan Rumah Di Desa Kolam. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 11–18.
- Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2023). Implementasi Program Ketahanan Pangan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.723>
- Simatupang, E., Mardianto, & Junaidi. (2023). Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 13–25. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.32>
- Sufiyanto, Andrijono, D., Widayati, S., Anam, M. M., Zubizaretta, Z. D., & Yuniarti, S. (2021). Implementasi Sistem Hidroponik untuk Menunjang Program Ketahanan Pangan Pasca Covid-19 di Desa Sukowilangun. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(3), 177–188.
- Sukandar, A., Nim, E., & Lalu, U. (2017). Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Program Kawasan Tertib Lalu Lintas. *PubliKA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2017*, 6, 1–18.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Yuliansyah, E., Pramudiana, I. D., Pramono, S., Jl, A., No, S., Pumpungan, M., & Sukolilo, K. (2025).

Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan di Desa Godog , Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan. 4.

Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16–24. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i1.293>

PROFIL SINGKAT

Lusi Indri Fauziah, lahir pada tanggal 24 Januari 2002. Tempat kelahiran di Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini sedang menyelesaikan pendidikan jenjang S1 pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan akan lulus pada tahun 2025.